

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII press, Yogyakarta, 2004.
- Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Ufuk Press, Jakarta, 2006.
- Ali, M., & Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan: Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Andi Hamzah, *Berbagai Tindak Pidana Khusus Di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005.
- Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, ICJR, Jakarta, 2015.
- Badudu Zairi, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Clolid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 2001.
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Hawkins dalam Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan, Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Husin, S, *Penegakan Hukum Lingkungan: Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Jan Rammelink, *Hukum Pidana Dalam Undang-undang Hukum Pidana Belanda*, Grenmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Kusumo, Sudiknomerto, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan, Edisi Kedua* Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hlm
- Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dalam Dimensi Politik Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, FHUNDIP, Semarang, 1989.
- Muhamad Akib, *Hukum Lingkungan Persepektif Global dan Nasional*, Rajawali, Jakarta, 2014.
- Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban pidana korporasi*, Edisi revisi, Kencana Pernada Media Group, Jakarta, 1998.
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*, Bina cipta, Jakarta, 1985.
- Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Buku Seru, Jakarta, 2010.
- Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1997.
- Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003.
- Salim H.S, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.
- Siska Elvandari, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia*, Thapa Media, Yogyakarta, 2015
- Sjawie, H. F, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tipikor*, Prenada Media, Jakarta, 2018.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006.
- Sukandarrumidi, *Bahan-Bahan Galian Industri*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, Yogyakarta, 1986.

Tim Redaksi Pustaka Yustisia, kumpulan Peraturan Pemerintah 2010 tentang pertambangan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.

Wahyu Nugroho, *Buku Ajar Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2022

Zainal abidin, *Pencemaran Limbah Berbahaya Beracun: Suatu Kajian Yuridis, Biena Edukasi*, lhoksumawe, 2013.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pertambangan Mineral Dan Batubara

Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

C. Skripsi/Jurnal

Abidin, Z., & Akli, Z. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat yang Terpapar Limbah B3. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 28-39.

Ahmad Redi, Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batu Bara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016, hlm.104.

Anantama, A. T., Munawir, Z., & Rafiqi, R. (2020). Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 133/Pid. B/2013/PN. MBO). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2), 119-131.

Astuti, A. D., & Putranti, I. R. (2018). *Implikasi Kebijakan Indonesia dalam Menangani Kasus Pencemaran Lingkungan oleh PT. Freeport terhadap Keamanan Manusia di Mimika Papua*. *Journal of International Relations*, 4(3), 547-555. hlm. 5.

Daulay, M. M. (2023). Kebijakan hukum terkait korporasi yang terlibat pencemaran lingkungan. *Jurnal Notarius*, 2(1).

- Effendi, E. (2022). Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda. *Jurnal Usm Law Review*, 5(2), 618-632.
- Efi, dikutip dari Harian Singgalang diakses 11 April 2025. <https://www.metrokini.com/2025/04/11/tambang-emas-ilegal-marak-di-pasaman-barat-masyarakat-minta-ditindak/>.
- Fadhli, R, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan, *Master's thesis*, Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm 32.
- Fadhly, Kumendong, Pinasang, Kewenangan Polri Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan *Illegal mining* Di Indonesia Melalui Upaya Preventif Dan Represif, *Junal Ilmiah bidang Hukum*, hlm. 111.
- Faiz, P. M. (2016). *Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi (Environmental Protection in Constitutional Perspective)*. *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 766-787. hlm. 767.
- Falah, R. A. (2024). *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Fitriah, N. (2017). Tinjauan Yuridis tentang Kriteria Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Halu Oleo Law Review*, 1(2), 220-245.
- Gumengilung, A. (2017). *Pengaturan dan Pertanggung Jawaban dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. *Lex Crimen*, 6(4). hlm. 31.
- Herman, H., *et.all*. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2) 2022, hlm 261- 275,.
- Jerico Lavian Chandra, “*Tindak Pidana Illegal mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin*” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020, hlm. 54
- Kim, S. W. (2009). *Kebijakan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup* (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Lala, A., & Kosim, K. (2025). Effectiveness of Criminal Sanctions Enforcement against Environmental Pollution by Industrial Corporations in Indonesia: Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana atas Pencemaran Lingkungan oleh

- Korporasi Industri di Indonesia. *Journal of Society and Development*, 5(1), 37-43.
- Mardjono Reksodiputro, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya, Perubahan Pelaku Wajah “Kejahatan di Indonesia, kumpulan Karangan bukunke satu: Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Penegakan Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 103.
- Ni Putu Ria Dewi Marheni, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Berkaitan dengan Pencantuman Disclaimer oleh Pelaku Usaha dalam Situs Internet (Website)*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Denpasar, Vol 3, No 1, 2014.
- Nur, R. (2020). *Rekonstruksi Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Siregar, J., & Zul, M. (2015). Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 8(2), 107-131.
- Siregar, R. A. F. *Analisis Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Jalan uUntuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus Di Polda Bandar Lampung)*.skipsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2022, hlm 11.
- Subyakto, K. (2015). Azas Ultimum Remedium Ataupun Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2), 209-213.
- Sugiartha, I. N. G., & Widiati, I. A. P. (2020). *Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Daerah Bali*. Kertha Wicaksana, 14(2), 96-102. hlm. 97.
- Suhanda, R. (2024). Pertanggungjawaban Pelaku Korporasi Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, 5(1), 38-43.
- Trisnia Anjami, The Social Impact Of Illegal Gold Mining In The Village Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, *Jurnal JOM FISIP*, Vol.4, No.22, 2017, hlm. 6.
- Winarsa, P. A. F., Rukmini, M., & Takariawan, A. (2022). Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi (Studi Tentang Pencemaran Dan Perusakan Yang Terjadi Di Sungai Citarum). *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 4(1), 162-162.

Wiranti, A. (2022). *Implementasi Pemidanaan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Yulianingrum, A. V., & Oktaviani, Y. W. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pemulihan Lingkungan Oleh Korporasi. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 174-188.

Yulianto, dikutip dari Sumbarkita diakses 10 April 2025. <https://sumbarkita.id/tambang-emas-ilegal-marak-di-pasaman-barat-bupati-usulkan-pertambangan-rakyat/>.

Yusni, M., & Sigalingging, B. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Rangka Untuk Deterrence Effect Dan Effective Deterrence. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 425-437.

D. Internet

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kategori C, Pertambangan danPenggalian, diakses pada tanggal 7 Juni 2018 dari situs <https://www.bkpm.go.id>

<https://www.walhijambi.or.id/legalisasi-tambang-ilegal>

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama>

Identitas.Com, <https://Identitas.Com/Penelitian-Hukum-Dikelompokkan-Berdasarkan-Sifat-Dan-Faktor-Kajian/>,Diakses Tanggal 04 September 2024.